



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTIKNO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **443916**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.090.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/102 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **116.000.000**

1. MOTOR, HONDA / BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA / CALYA RODA EMPAT / STATION WAGON Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT KENDARAAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **20.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **17.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.243.000.000**

III. HUTANG Rp. **126.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.117.000.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.